

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas se Kota Gorontalo telah diterapkan di seluruh Puskesmas tetapi masih ada 3 puskesmas dari 10 puskesmas yang masih belum menjalankan dengan efektif implementasi kebijakan peraturan daerah tanpa kawasan tanpa rokok yaitu puskesmas dumbo raya, puskesmas hulonthalangi dan puskesmas pilolodaa.
2. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas se Kota Gorontalo diantaranya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat, masih terdapat masyarakat yang setuju dan tidak setuju dengan adanya peraturan daerah kawasan tanpa rokok dan masih perlu peningkatan kegiatan sosialisasi serta tindak lanjut.

5.2 Saran

1. Bagi sasaran penyuluhan

Bagi para sasaran penyuluhan dalam hal ini masyarakat sebaiknya dapat menerapkan perda kawasan tanpa rokok dengan cara tidak merokok di kawasan tanpa rokok seperti Puskesmas dan sekolah.

2. Bagi institusi kesehatan

Diharapkan kepada pihak Puskesmas dapat terus mensosialisasikan perda nomor 10 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok.

3. Bagi Peneliti

Peneliti selanjutnya dapat mengangkat faktor lain yang tentang penerapan perda kawasan tanpa rokok dan menggunakan penelitian ini sebagai referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cetakan kedua. Alfabeta. Bandung
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Azkha. 2013. *Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat Tahun 2013*, JURNAL Kebijakan Kesehatan Indonesia, Volume 02 Nomor 04 Desember 2013, Hal. 171-179.
- Chourmain, I. 2008. *Acuan Normatif Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Al-Haramain Publishing House, Jakarta.
- Fatmasari. 2014. *Perilaku Supir Angkutan Pasca Penetapan Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Makassar*, ARTIKEL, FKM Universitas Hasanuddin Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10624/Intan%20Fatmasari%20K11110006.pdf?sequence=1>, Diakses tanggal 19 Mei 2015
- Hamdi, M. 2014. *Kebijakan Publik. Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia. Bogor
- Notoatmodjo, S. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta
- Prasetyo. 2014. *Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Stasiun Tawang Kota Semarang*, ARTIKEL Universitas Diponegoro Semarang, RI. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=195520&val=4925&title=implementasi%20kebijakan%20kawasan%20tanpa%20rokok%20di%20stasiun%20tawang%20kota%20semarang>. Diakses tanggal 19 Mei 2015.
- Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes RI. 2011. *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, Kemenkes RI, Jakarta.
- Saly J.N, dkk, 2011. *Laporan Akhir Penelitian Hukum Efektivitas Peraturan Terkait Pengendalian Produk Tembakau terhadap Kesehatan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Siregar, S. 2013. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif; dilengkapi dengan perhitungan manual dan aplikasi SPSS versi 17*. Bumi Aksara. Jakarta.

- Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Cetakan keenam. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan ke18. Alfabeta. Bandung
- Suharto, E. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Cetakan kelima. Alfabeta. Bandung.
- Syafiie, I. K. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Cetakan kedua, Rineka Cipta. Jakarta.
- Wahab, S.A. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UMM Press. Malang.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Cetakan kedua. Buku Seru. Jakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang **Kawasan Tanpa Rokok**.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan